**BAB II**

**KONDISI HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA**

**PASCA SOEHARTO**

1. **Politik Luar Negeri Republik Indonesia**

Politik luar negeri merupakan seperangkat kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai kepentingannya. Setiap negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain memiliki seperangkat aturan untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Hal ini disebabkan dalam konteks hubungan internasional pemerintah hendaknya memiliki rancangan strategi dalam menjalin hubungan yang seluas-luasnya dengan negara-negara lain agar nantinya negara tersebut dapat menentukan sikapnya di depan dunia internasional.

Pada dasarnya prinsip dari politk luar negeri Indonesia yang bebas-aktif berlandaskan Pancasila dan Konstitusional UUD 1945. Pada dasarnya setiap prinsip politik luar negeri Indonesia di buat melihat unsur penting yaitu kepentingan nasional atau national interest. Bukan hanya Indonesia tetapi juga negara-negara lain di dunia. Selain komitmen pada kepentingan nasional (national interest), politik luar RI juga tetap mengedepankan perinsip dasar bangsa Indonesia yang anti kolonialisme. Dalam memutuskan setiap kebijakan politik luar negeri Indonesia mengedepankan nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung teguh. Politik luar negeri bebas aktif menjadi dasar pelaksanaan setiap kebijakan yang akan dibuat, selain melihat kondisi dalam negeri pemerintah Indonesia juga mengedepankan prinsip-perinsip yang telah tertera dalam pembukaan UUD 1945.

20

Di bidang hubungan luar negeri, sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan selalu diarahkan untuk mendukung terciptanya perdamaian dunia, telah menempatkan Indonesia dalam posisi dan peranan yang makin dipercaya dalam percaturan politik regional dan global. Di samping itu telah berhasil pula ditingkatkan kerjasama bilateral dan multilateral dengan berbagai negara sahabat dan berbagai lembaga internasional untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional.

21

Tampak jelas bahwa ide dasar politik luar negeri bebas aktif yang dikemukakan oleh Hatta merupakan suatu kebenaran mengenai kemandirian dan kemerdekaan, akan tetapi dilandasi pemikiran rasional dan bahkan kesadaran penuh akan prinsip-prinsip realisme dalam menghadapi dinamika politik internasional dalam konteks dan ruang waktu yang spesifik. Bahkan dalam pidato tahun 1948 tersebut, Hatta dengan tegas menyatakan, percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pergolakan politik internasional.[[1]](#footnote-2)

Pada masa Orde Baru, pendulum politik bebas aktif justru lebih condong ke kanan.[[2]](#footnote-3) Ini sejalan dengan kepentingan nasional pada masa Orde Baru yang lebih menonjolkan aspek pembangunan ekonomi telah “memaksa” Indonesia berpaling ke kanan karena, seperti yang di tulis Suryadinata, “Indonesia tergantung pada Industri dan bantuan ekonomi Barat yang dipimpin Amerika”.

22

Memang hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat (Termasuk Jepang dan Australia) bukan hanya berlatar belakang faktor ekonomi, melainkan juga faktor keamanan. Dalam hal ini Australia memiliki posisi penting, terutama dalam kaitannya dengan masalah Timor-Timur dan Irian Jaya. Seperti diketahui pada masa Orde Baru, Timor-Timur menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam politik luar negeri Indonesia. Kabarnya, Australia menerima integrasi Timor-Timur sebagai suatu *fait accompli[[3]](#footnote-4)* guna memelihara hubungan baik Jakarta-Canberra.

Sejak awal masa Orde Baru sampai pertengahan 1980-an, ABRI lebih berperang dalam menentukan arah politik Indonesia. Akan tetapi, sejak pertengahan 1980-an sampai sekarang, peranan yang lebih menentukan justru ada di tangan Presiden. Politik luar negeri Indonesia memang di formulasikan oleh kalangan elite ketimbang “massa” melalui suatu proses demokrasi. Para elite ini dipengaruhi oleh budaya politik dan pengalaman sejarah dan mereka ketika merumuskan suatu kebijakan luar negeri. Latar belakang yang “abangan” dan kuatnya rasa nasionalisme kalangan yang elite tercermin dalam kebijakan luar negari Indonesia.

Dalam kaitan antara budaya politik dan politik luar negeri era Orde Baru, kendati mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun Islam dinilai sama sekali tidak pernah menjadi faktor dominan dalam perumusan maupun pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.[[4]](#footnote-5)

23

Secara lebih jauh, pemerintah memiliki variasi dalam kemampuan yang dimiliki untuk mengontrol migrasi masuk ke negaranya. Sebuah negara mungkin memiliki kemampuan untuk membendung masuknya migran secara ilegal untuk mencari nafkah. Sebuah negara yang ingin mengontrol migrasi ilegal yang masuk, namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, akan melihat kondisi semacam ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan yang dimiliki nya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai dimensi politik dari migrasi international menjadi sangat vital dan krusial dalam analisis terhadap fenomena migrasi international yang akan dilakukan.

Indonesia yang saat ini berpenduduk dari lebih dari 200 juta (keempat terbesar didunia sesudah Cina, India, Amerika serikat), menempati posisi geopolitik yang unik karena merupakan “Jembatan” antara negara-negara Asia dan Australia serta pasifik. Sekedar memperoleh gambaran tentang besarnya dimensi kependudukan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi tetangganya.[[5]](#footnote-6)

Ada perbedaan yang cukup menyolok antara politik luar negeri Indonesia di bawah era Sukarno dan era Soeharto. Pada era Sukarno politik luar negeri lebih di gerakkan oleh tanggapan Sukarno atas lingkungan International yang di pandang sebagai sumber ancaman terhadap kesatuan dan integrasi nasional. Sedangkan pada era Soeharto politik luar negeri lebih digerakkan oleh kebutuhan untuk membangun perekonomian bangsa. Lingkungan international tidak sepenuhnya dianggap sebagai potensi ancaman nasional, sementara ancaman dari dalam negeri justru dianggap jauh lebih berpotensi menghalangi proses penyatuan dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sejak Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto, definisi ancaman nasional bergeser secara dramatis dari ancaman eksternal yang berasal dari negara-negara besar menuju ancaman domestik yang berasal dari komunisme, dan kelompok-kelompok yang didentifikasi sebagai anti pancasila. Sepanjang kepemimpinannya, soeharto membangun sistem keamanan nasional yang terfokus hampir sepenuhnya pada ancaman internal.

24

24

Ada beberapa alasan mengapa faktor-faktor domestik memainkan peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Dalam pandangan Soeharto bangsa yang dipimpinnya adalah bangsa yang miskin, tidak terdidik, jumlahnya sangat besar, tinggal di berbagai pulau yang tersebar, fasilitas transportasi dan komunikasi yang sangat buruk. Pemberontakan komunis hingga dua kali memberinya pelajaran bahwa bangsa ini juga rentan terhadap gerakan politik radikal justru karena kondisi ekonomi, politik, dan sosial bangsa. Kondisi dalam negeri ini berujung pada kebutuhan yang besar dan strategis untuk membangun keamanan dalam negeri sebagai dasar pembangunan bangsa. Kegagalan Orde Lama dalam menciptakan keamanan negeri jelas sangat memengaruhi kinerja ekonomi pemerintahan sehingga pemerintah Orde Lama tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar penduduk yang terus bertambah. Oleh karena itu, keamanan nasional dipandang oleh para petinggi Orde Baru tidak sekedar keamanan dalam artian militer semata-mata. Keamanan sebaliknya diperluas maknanya menjadi keamanan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya bangsa.

25

1. **Kondisi Hubungan Indonesia-Australia Masa Pemerintahan Soeharto**

Ada banyak perubahan dalam pemerintahan Australia semenjak kemerdekaan Indonesia yang berdampak terhadap hubungan bilateral. Namun kekalahan Paul Keating menjadi signifikan karena dua hal. Pertama, ia terikat secara personal dengan Australia-Indonesia *Agreement on Maintaining Security* (AMS) yang ditandatangani bersama Soeharto di tahun 1995. Apapun substansinya, AMS merupakan simbol tingkat kedekatan dan rasa saling mendukung dan menghormati antara kedua negara, dan hal ini jarang terjadi dalam hubungan bilateral yang selalu stabil. AMS di bangun berdasarkan strategi \dipromosikan Menteri luar negeri Ali alatas dan Gareth Evans, untuk memecahkan persoalan-persoalan dan membangun jangkar dalam hubungan bilateral. Kedua, Keating mengekspresikan secara terbuka dan lugas, apa yang di terima pendahulunya: bahwa kestabilan yang diciptakan Soeharto dengan prinsip anti-komunis, rezim yang terpusat dan stabil yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan pengaruh paling menguntungkan bagi lingkungan strategis jangka pendek Australia. Signifikasi strategis Indonesia bagi Australia tidak tertandingi oleh negara manapun.

Dibawah Soeharto, Australia terbiasa dengan pemerintah Indonesia yang percaya diri dibawah kendali satu orang. Soeharto mampu dan bertekad untuk menolak atau tidak mengindahkan keingintahuan dunia international. Pada puncak kekuatan Soeharto, Indonesia mampu menyikapi dunia International menurut kehendaknya sendiri. Namun krisis moneter telah mengubah Indonesia hanya dalam hitungan bulan, menjadi sebuah negara tergantung pada IMF dan Bank Dunia serta negara-negara donor. Indonesa selalu kehilangan sebagian kedaulatan nasionalnya. Australia harus belajar menyikapi Indonesia yang kini jauh lebih lemah, sensitif dan rapuh, dimana pemerintah pusatnya diwarnai oleh terbesarnya kekuasaan, sehingga arti penting pemerintah lokal dan provinsi kembali muncul.[[6]](#footnote-7)

26

Australia sejak pemerintahan Fraser telah mengakui dan membela kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste dengan resiko biaya domestik dan cemohan international atas keputusannya. Pemerintah Australia telah mencoba, meski tidak berhasil untuk menyembunyikan hubungannya dengan Indonesia dari kontroversi domestik dan international seputar masalah Timor Leste. Bersatunya Timor-Leste dengan Indonesia, merupakan piorotas pilihan strategis pemerintahan Australia sejak awal 1960-an. Perjanjian Timor-Timor 1989 yang ditandatangani Alatas dan Evans menyebabkan manisnya laut Timor, melambangkan strategis pemerintahan Hawke-Keating untuk mengembangkan dan membangun jangkar dalam hubungan bilateral. Perjanjian ini mengharmoniskan kepentingan diplomasi, strategis dan ekonomi kedua pemerintahan.

Namun pada beberapa kasus lain, terlihat perbedaan prespektif dan nilai politis serta budaya yang lebih jelas dibandingkan kasus Timor Leste. Timor Leste telah menjadi faktor yang menggelisahkan dalam hubungan bilateral. Pada puncak krisis menyusul pengumuman hasil referendum, merebaknya perasaan jijik di Australia atas pembunuhan dan penghancuran yang dilakukan TNI dan melisihnya yang mendominasi isu Timor Leste terlihat begitu kontras dengan sakit hati yang menyesakkan Indonesia atas kepemimpinan Australia dalam intervensi international terhadap urusan internal Indonesia. Transformasi Australia dari negara Barat pendukung utama kedaulatan Indonesia atas Timor Leste menjadi pemimpin intervensi international memang dramatis, membawa beragam akibat terhadap hubungan bilateral. Penelitian ini menegaskan bahwa pemisahan Timor Leste alih-alih menyingkirkan salah satu halangan menuju hubungan yang lebih erat, malah menandai kemunculan hubungan trilateral yang lebih rumit dan sensitif, dimana Australia harus menyimbangkan dukungan atas rekonstruksi Timor-Leste merdeka di satu sisi, dan membangun kembali hubungannya dengan Jakarta di sisi lain. Usaha yang pertama akan mendatangkan banyak simpati publik, sedangkan kedua akan ditengarai dengan kecurigaan.[[7]](#footnote-8)

27

Hubungan Indonesia-Australia telah berlangsung dalam konteks yang lebih luas dimana hubungannya banyak berubah dengan pengaruh komunitas internasional. Krisis ekonomi dan politik indonesia secara mendasar telah mentransformasikan hubungannya dengan dunia luar. Di masa kejayaan Soeharto, Indonesia mampu mengatur hubungan eksternalnya pada tingkat yang dikehendaki. Perusaan multinasional yang sekarang mengkritisi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), banyak yang berinvestasi pada zaman Soeharto. Selama Perang Dingin, Indonesia dapat mengandalkan dukungan AS dan banyak negara Barat lainnya. Untuk menyikapi kritik Belanda terhadap pembantaian di Dili, Soeharto mampu menghentikan program bantuan dari Belanda untuk Indonesia. Bagi Ali Alatas, Timor leste adalah krikil dalam sepatu Indonesia.[[8]](#footnote-9)

Orde Baru memiliki sistem pemerintahan dengan institusi politik yang lemah termasuk partai politiknya. Kondisi ini memang sangat tidak kondusif untuk sebuah kerja besar. Akan tetapi, juga memberikan keuntungan bagi para petinggi Orde Baru karena memiliki kesempatan untuk menjadikan keyakinan mereka sebagai nilai-nilai dasar yang harus diikuti seluruh bangsa dan negara. Instabilitas politik yang sedemikian parah pada masa Sukarno menjadi alasan bagi Soeharto untuk menciptakan kondisi agar stabilitas politik segera terbentuk. Untuk itu Soeharto membangun militer yang bersenjata pada konsepsi Dwi Fungsi ABRI. Dengan Konsepsi ini tentara Indonesia dapat bergerak dalam dua bidang sekaligus yakni bidang keamanan dan bidang sosial-politik. Konsepsi inilah jalan masuk militer kedalam politik dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme.

28

25

Politik luar negeri Orde Baru di bawah Soeharto merupakan kebalikan dari Orde Lama dibawah Sukarno. Pandangan Sukarno tentang politik luar negeri sangat kuat dipengaruhi pemikiran-pemikiran anti-kolonialisme yang telah berkembang sejak masa mudanya. Suharto, sebaliknya pandangan politik luar negerinya tidak terlepas dari pertimbangan dalam negeri. Pengalaman politik yang berbeda membuat keduanya memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dalam memahami makna dasar politik luar negeri Indonesia.

Embrio perbedaan pandangan ini sesungguhnya telah mulai tumbuh sepanjang pemerintahan Sukarno. Dibawah kepemimpinan Sukarno, Indonesia nyaris tidak berhenti dari proses pembentukan negara disertai serangkaian pergolakan nasional dan daerah. Pemberontakan PKI di Madium 1948, pemberontakan bersenjata di Sulawesi (PERMESTA), Sumatera (PRRI), Jawa Barat (Darul Islam), dan pembebasan Irian Barat merupakan serangkaian pergolakan yang menyedot energi politik, ekonomi dan birokrasi pemeritahan pusat. Baik kasus PRRI maupun Irian Barat secara tidak langsung merupakan ancaman domestik yang sedikit banyak melibatkan ancaman eksternal. Keterlibatan CIA dan belanda pada kedua kasus diatas merupakan alasan kuat mengapa sikap anti kolonialisme masih melekat kuat pada pemikiran dan tindakan Sukarno. Rangkaian perundingan dengan pemerintah Belanda yang senantiasa berakhir gagal memperkuat pemikiran Sukarno bahwa musuh utama republik baru adalah ancaman eksternal.[[9]](#footnote-10)

29

Semangat anti-kolonial Sukarno yang sangat militan di satu pihak memang menguntungkan posisinya sebagai presiden. Bagi Sukarno isu-isu anti kekuatan asing juga membantunya mengidentifikasi kawan dan lawan. Dengan sendirinya Sukarno sebagai pemain sentral menjadikan isu-isu tersebut untuk mengelola konflik dalam negeri. Akan tetapi, disisi lain fokus pada upaya menghadapi “lawan dari luar” ini membuat kebutuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi terabaikan. Sukarno dan kelompoknya tidak menanggapi tuntutan kelompoknya menanggapi tuntutan kelompok “administrator” untuk memperbaiki keadaan ekonomi bangsa yang terus memburuk. Pemikiran dan tindakan Sukarno justru memperkuat jurang pemisah antara kelompok anti-komunis (Muslim dan Militer) dan PKI. Krisis politik-ekonomi ini berakhir dengan pecahnya pemberontakan G30SPKI dan munculnya Orde Baru dibawah kepimpinan Soeharto.

Pandangan politik Soeharto berseberangan dengan Sukarno. Soeharto memandang persoalan dasar Indonesia adalah pembangunan ekonomi. Dengan menjadikan para teknokrat sebagai orang dekatnya, Soeharto melakukan reorientasi pembangunan nasional dengan fokus pada persoalan-persoalan ekonomi. Pada waktu yang sama, ancaman eksternal tidak lagi dipandang sebagai persoalan fundamental bangsa. Soeharto, sebaliknya memandang keamanan dalam negeri sebagai persoalan politik utama. Reorientasi kebijakan keamanan nasional ini membuka jalan bagi Orde Baru untuk mendapatkan lebih banyak bantuan asing yang memang diperlukan untuk memulai pembangunan yang sesungguhnya setelah diabaikan Sukarno selama dua dekade.

30

Lebih jauh, Orde Baru memahami politik luar negeri sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup dan untuk mempertahankan integrasi wilayah. Oleh karena itu, politik luar negeri tidak hanya dipandangan dalam pengertian politik militer, tetapi lebih luas lagi dilihat sebagai upaya menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pembangunan ekonomi merupakan sisi lain upaya Orde Baru mempertahankan keamanan nasional. Stabilitas politik dalam kacamata Orde Baru harus dipotong dengan pembangunan ekonomi, karena tanpa pembangunan ekonomi potensi ketidakpuasan publik akan semakin lebar. Melalui pembangunan ekonomi juga diharapkan pemerintah akan mampu meningkatakan hajat hidup orang banyak. Persoalan dasar pembangunan ekonomi adalah rendahnya keterbukaan politik yang merupakan lahan subur bagi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pembangunan ekonomi ternyata hanya memberi keuntungan bagi segelintir konglomerat dan keluarga presiden. Kerusuhan Mei 1998 adalah puncak dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru.[[10]](#footnote-11)

31

Kebijakan luar negeri Indonesia berpihak pada kepentingan nasional. Pandangan ini setidaknya diatur oleh undang-undang pasal 3 UU. No. 37 tahun 1999 menyatakan bahwa Indonesia, kebijakan luar negerinya berpijak pada prinsip bebas aktif dan diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga kedaulatan nasionalnya. [[11]](#footnote-12)

1. **Hubungan Indonesia-Australia Pasca Soeharto**

Pemerintahan dan politik, hubungan Indonesia-Australia tidak selalu mulus. Banyak kalangan yang tidak sepakat pada kebijakan perdana menteri Howard yang bagi kalangan Indonesia mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam hal Timor-Timur, dan kemudian juga dukungan setia pemerintah Australia kepada Amerika serikat dalam serangan ke Afganistan dan Irak.

Pada pihak lain, bukan rahasia lagi terdapat kalangan di Australia yang menganggap Indonesia sebagai ancaman bagi keamanan Australia. Walaupun Indonesia tidak memiliki ambisi teritorial maupun kemampuan militer yang memadai, Indonesia di pandang dapat mengganggu Australia. Karena itu, perubahan-perubahan politik dan bahkan sosial-ekonomi yang terjadi di Indonesia, khususnya sejak masa pasca Soeharto, mendapat pengamatan khusus dari pemerintah Australia. Diantara hal yang mendapat perhatian khusus di Australia umumnya adalah perkembangan dan dinamika Islam di Indonesia.[[12]](#footnote-13)

32

Tidak diragukan bahwa kemunculan Indonesia sebagai masyarakat demokratis, terbuka dan toleran merupakan kepentingan nasional Australia. John McCarthy memang benar ketika berpendapat bahwa rezim otoriter di Jakarta telah menjadi hambatan kedekatan hubungan bilateral, jika bukan bagi para pembuat kebijakan dan pemerintahan di Canberra, maka bagi banyak orang dalam masyarakat Australia, pemutusan hubungan sering menjadi subyek kontroversional dalam politik domestik. Tidak ada satupun pemerintahan Australia yang mampu melakukan hubungan baik dengan Indonesia hanya dengan bersandar pada hubungan government-to-government, tanpa terpengaruh oleh opini domestik.

Pada periode pasca Soeharto, ada tanda-tanda meyakinkan bahwa pemerintahan demokratis di Indonesia akan sering berada di bawah pengamatan publik. Akan ada politisi, jurnalis akan akademis yang mencoba mempengaruhi arah kebijakan atas Australia. Indonesia dengan cepat menemukan kembali integrasi media yang bebas. Tidak ada hal lain yang menjadi bukti kuat dari bebasnya pers Indonesia selain kritiknya terhadap Australia. Segera setelah penempatan pasukan *Interfet* Australia di Timor Leste, media-media besar di Indonesia menyebarkan berita bagaimana tentara *Interfet* menyiksa milisi pro-Indonesia dan membakar salah satu dari mereka hidup-hidup. Koran *Indonesia Observer* melaporkan bahwa Australia telah merobek bendera Indonesia. Penyangkalan kedutaan besar Australia saat itu tidak banyak membantu.

Ikrar Nusa Bhakti, spesialis hubungan international dari LIPI, menekankan adanya sejumlah aktivitas anti-Australia. Para demonstran mengincar kedutaan besar Australia di Jakarta dan Konsultan Jendral di Surabaya. Bendera Australia di bakar, ada juga ancaman untuk menghentikan impor dari Australia. Bahkan ada tuntutan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia (Ikrar Nusa Bhakti,1999). Demonstrasi di luar kedutaan mungkin telah digerakkan, tapi tak bisa di sangkal bahwa perasaan anti-Australia memang ada, bahkan diantara mereka yang bekerja dan belajar di Australia serta mendukung gerakan reformasi. Peran Australia di Timor-Leste telah menyinggung perasaan nasionalisme yang sensitif. Dalam proses demokratisasi Indonesia, ada kesempatan mendasar untuk mengekspresikan pandangan dan berdemonstrasi.[[13]](#footnote-14)

33

Berlanjutannya sensitivitas terhadap hubungan dengan Australia di demonstrasikan dengan kontroversi atas penyusupan pesawat terbang Australia melewati wilayah Indonesia. Tuduhan itu paling disuarakan oleh Yasril Ananta Baharuddin, kader Golkar dan ketua komite investigasi parlemen. Klaim ini diperkuat oleh wakil Marsekal AU, Alimunsiri Rappe, yang pertnyataannya di kutip dalam detik.com: “pengawasan radar kami menunjukkan frekuensi tinggi dari pelanggaran penerbangan Australia di wilayah kedaulatan Indonesia. Jika pelanggaran tersebut terus dilakukan tanpa mengindahkan peringatan, kami tidak punya pilihan lain kecuali menembak jatuh pesawat tersebut”. Sampai tahun 2000, belum ada satu peluru yang ditembakkan, baik dari darat maupun udara, pada pesawat asing yang menyusup kedalam wilayah udara Indonesia.[[14]](#footnote-15)

Australia bisa mempermasalahkan substansi tuduhan yang ditayangkan media Indonesia, tapi ini tidak mengalihkan perhatian dari perubahan dinamika dalam politik domestik Indonesia. Sekarang Indonesia memiliki parlemen yang menggunakan otoritasnya di luar bayang-bayang masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Pemerintahan Presiden Wahid merupakan koalisi besar yang berjuang mempertahankan kohesinya, sambil mencoba memperaktekkan otoritasnya atas militer. Ada dugaan kalau John McCarthy dapat sepaham dengan pandangan rekan Indonesianya di Canberra, yang mengingatkan media bahwa kalau mereka tidak meredakan aksinya maka upaya perbaikan hubungan akan menjadi sulit. Media yang aktif dan beragam adalah elemen lain yang membuat kekuatan politik di Indonesia makin mengerucut, sesuatu yang kontras dengan masa Soeharto.[[15]](#footnote-16)

34

1. # Navira Ariani Sudarso**.** *Politik Luar Negeri Indonesia: Gaya Perpolitikan dan Dominasi Politik Luar Negeri Gus* Dur.http://politik.kompasiana.com/2012/04/23/politik-luar-negeri-indonesia-gaya-perpolitikan-dan-dominasi-politik-luar-negeri-gus-dur-451989.html, *diakses tgl 10 Juni 2013*

   [↑](#footnote-ref-2)
2. *Pada era Soekarno (1945-1965),* pendulum politik bebas-aktif lebih condong bergerak ke kiri, dengan garis poros Pyongyang-Peking-Pnompenh-Jakarta nya, dan tampak garang terhadap AS dan sekutu Baratnya. *Pada masa Orde Baru (Orba),* pendulum itu bergerak ke kanan. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan asing yang membantu berdirinya rezim Orde Baru melalui demokrasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang merupakan hasil gemblengan AS dan CIA. [↑](#footnote-ref-3)
3. *fait accompli* adalah Keadaan yang dihadapi, ketentuan yang harus diterima. [↑](#footnote-ref-4)
4. Riza Sihbudi. *Indonesia Timur Tengah* (Jakarta:Gema Insani Press,1997). Hlm 5-7 [↑](#footnote-ref-5)
5. Riwanto Tirtosudarmo. *Mencari Indonesia*. (Jakarta: :LIPI Press,2007).Hlm 229-230 [↑](#footnote-ref-6)
6. Richard Chauvel,dkk. *Indonesia-Australia: Tantangan dan kesempatan Dalam Hubungan Politik Bilateral.*(Jakarta: Granit, 2005). Hlm 3 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* Hlm 4 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*. Hlm 14 [↑](#footnote-ref-9)
9. Siswanto, *Pusat Penelitian Politik : Politik BBM*, (Jakarta: LIPI,2005). Hlm 48 [↑](#footnote-ref-10)
10. Bambang Cipto. *Hubungan International di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006). Hlm 86-93 [↑](#footnote-ref-11)
11. Siswanto, *Op.Cit.*Hlm 50 [↑](#footnote-ref-12)
12. Azyumardi Azra. *Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslimin dari Australia Hingga Timur Tengah.* (Jakarta selatan: Hikmah,2007). Hlm 93-94 [↑](#footnote-ref-13)
13. Richard Chauvel,dkk. *Indonesia-Australia: Tantangan dan kesempatan Dalam Hubungan Politik Bilateral.*(Jakarta: Granit, 2005). Hlm 20 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.* Hlm 21 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.*Hlm 23 [↑](#footnote-ref-16)